

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Toriq Dwi Citra Permata
NPP. 31.0575

Asdaf Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: citra.permata.cp20@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Nur Saribulan, S.IP, MPA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) *Stunting in Lamongan Regency in the prevalence of stunting increased in 2021 by 22.5% to 27.5% in 2022. **Purpose** of this research is to determine and describe how collaborative governance in accelerating stunting reduction in Lamongan Regency, East Java Province through the 1-10-100 program. **Method:** This study qualitative method with data collection techniques in this study were documentation and interviews the data analysis was carried out by utilizing NVivo 12 software which supported the author in coding with various features available. **Results:** showed that collaborative governance in accelerating stunting reduction in Lamongan Regency through the 1-10-100 program is still not in accordance with the meaning of collaboration. Looking at the initial condition dimension at the level of trust and ability of stakeholders is still going well. While in the dimensions of facilitative leadership, institutional design, and collaboration processes, there are problems, namely the unequal tasks and responsibilities of stakeholders that are only dominant in TP PKK, and unclear rules marked by the absence of SOPs. **Conclusion:** In several dimensions, phenomena were found, such as in the initial conditions dimension that there were no equal rights and responsibilities in collaboration, in the facilitative leadership dimension where the role of stakeholders was the only indicator, in the institutional design dimension in the proportion through the hierarchy chart that process transparency was more dominant than other indicators, then in the dimension of the collaboration process one stakeholder was too dominant, namely the TP PKK and the rules were incomplete for the 1-10-100 program because it only used the TPPS Decree in Lamongan District number 188/133/KEP/413.013/2022 and Decree of Foster Parents to Accelerate Stunting Reduction in Lamongan District number 188/324/KEP/413.013/2023 and does not have an SOP for the 1-10-100 program.*

Keywords: *Collaborative Governance, Stunting, Program 1-10-100*

ABSTRAK

PERMASALAHAN (GAP): Stunting di Kabupaten Lamongan pada prevalensi stunting meningkat pada tahun 2021 sebesar 22,5% menjadi 27,5% pada tahun 2022. **Tujuan:** untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana *collaborative governance* dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur melalui program 1-10-100. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat lunak NVivo 12.

Hasil/Temuan: terdapat adanya permasalahan yaitu didapatkannya tugas dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang tidak setara dan hanya dominan pada TP PKK, serta aturan-aturan yang belum jelas ditandai dengan tidak adanya SOP. **Kesimpulan:** Pada beberapa dimensi ditemukannya fenomena, seperti pada dimensi kondisi awal bahwa tidak adanya hak dan tanggung jawab yang sama dalam berkolaborasi, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif yang dimana peran pemangku kepentingan menjadi satu-satunya indikator, pada dimensi desain kelembagaan dalam proporsinya melalui *hierarchy chart* bahwa transparansi proses lebih dominan dibanding indikator lainnya, lalu pada dimensi proses kolaborasi satu pemangku kepentingan yang terlalu dominan yaitu TP PKK serta aturan-aturan kurang lengkap untuk program 1-10-100 karena hanya menggunakan SK TPPS di Kabupaten Lamongan nomor 188/133/KEP/413.013/2022 dan SK Orang Tua Asuh Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lamongan nomor 188/324/KEP/413.013/2023 serta tidak memiliki SOP program 1-10-100.

Kata kunci: Collaborative Governance, Stunting, Program 1-10-100

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih menghadapi permasalahan seputar kesehatan dengan adanya masalah penyakit dan masalah gizi. Permasalahan gizi yang masih belum terselesaikan dan menjadi prioritas saat ini adalah stunting (Siswanto et al., 2020). Stunting adalah kondisi anak yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan dibandingkan pada anak-anak pada umumnya sesuai dengan standar umur (UNICEF, 2020). Stunting menurut Siswati (2018) merupakan kondisi dimana anak mengalami kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang diakibatkan kurangnya gizi (malnutrisi) dan infeksi yang berulang pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam kehidupan anak yang diperhitungkan dengan panjang badan dibanding umur dan tinggi badan dibanding umur melalui batas z score -2 dari standar deviasi. Stunting menjadi permasalahan penting karena menurut Survei Status Gizi Indonesia (2022) prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 21,6% dimana mengejar target prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN. Oleh karena itu Indonesia memiliki tantangan untuk menurunkan stunting setiap tahunnya sebesar 3,8% untuk mencapai target yang ditetapkan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Gambar 1 Prevalensi Stunting Setiap Provinsi Indonesia



Sumber: Diolah Penulis dari Survei Status Gizi Indonesia, 2022

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terdapat berbagai provinsi yang memiliki angka prevalensi stunting dengan tingkat tinggi dan rendah. Pada tahun 2022 Indonesia menduduki prevalensi stunting sebesar 21,6% yang dijadikan acuan batas prevalensi provinsi. Terdapat 18 provinsi pada tahun 2022 yang masih memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi di atas batas Indonesia dan terdapat 16 provinsi yang telah melewati angka prevalensi Indonesia yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Banten, Bengkulu, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Riau, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Lampung, DKI Jakarta, dan Bali.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka stunting yang telah dibawah rata-rata atau dibawah prevalensi Indonesia. Namun pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur menetapkan stunting sebagai tantangan untuk menurunkan angka stunting sebesar 16% pada tahun 2023. Meskipun Provinsi Jawa Timur prevalensinya sudah dibawah rata-rata Indonesia, tetapi masih terdapat banyak wilayah kabupaten didalamnya yang prevalensinya masih diatas 20% dan masih menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu Provinsi Jawa Timur menarik untuk dijadikan bahan penelitian dikarenakan adanya antusiasme berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting dengan penetapan target (Diskominfo, 2023).

Gambar 2 Prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kabupaten prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kabupaten



Sumber: Diolah Penulis dari Survei Status Gizi Indonesia, 2022

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kabupaten dan mayoritas masih pada angka stunting yang tinggi diatas angka stunting Provinsi Jawa Timur yaitu diatas 19,2%. Dalam prevalensi tersebut terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang masih memiliki prevalensi tinggi yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Ngawi, dan Lamongan. Berdasarkan prevalensi tersebut penulis ingin melakukan penelitian pada Kabupaten Lamongan dikarenakan permasalahan stunting di Kabupaten Lamongan meningkat dari tahun 2021 sebesar 20,5 menjadi 27,5 tahun 2022. Selain itu, karena penulis tertarik dengan adanya berbagai upaya penanggulangan stunting di Lamongan namun angka stunting tidak kunjung menurun.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan stunting yang terjadi di Kabupaten Lamongan merupakan masalah multisektor, dimana permasalahan tersebut terjadi akibat dari; (i) faktor ekonomi, sosial dan budaya, (ii) gizi ibu saat hamil, (iii) kurangnya asupan gizi, (iv) kurangnya asi eksklusif, (v) pola asuh yang kurang optimal, (vi) akses mutu pelayanan kesehatan yang kurang baik, (vii) serta kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak (Diskominfo, 2022). Masalah pertama pada aspek ekonomi, sosial dan budaya. Masalah ekonomi seperti pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga yang mempengaruhi pengeluaran, dan mampunya memberikan asupan makanan sesuai dengan kemampuan dana untuk memenuhi gizi anak (Siswati,2018). Kemiskinan adalah masalah ekonomi yang mempengaruhi stunting, menurut BPS (2022) terdapat 151,08 ribu jiwa penduduk miskin di Kabupaten Lamongan, sedangkan sosial budaya merupakan penyebab stunting dimana terdapat budaya tertentu yang mengharuskan seseorang dilarang memakan sesuatu yang akhirnya membatasi gizi anak (Aisyah, 2022), seperti di Lamongan terdapat larangan atau pantangan bagi warga Lamongan asli memakan ikan lele yang dianggap warga Lamongan dari kesulitan pada sejarah terdahulu, sementara ikan lele memiliki banyak manfaatnya untuk gizi. Faktor gizi ibu saat hamil merupakan salah satu faktor yang menyebabkan stunting. Pada pelaksanaan kegiatan skrining stunting yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten

Lamongan diperoleh hasil skrining pada ibu hamil dengan populasi 5970 dimana 2982 merupakan ibu dengan kondisi gizi masih normal, 2507 gizi perlu pengawasan, dan 456 gizi buruk (PMD Lamongan, 2023). Gizi buruk adalah masalah ketiga yang mempengaruhi adanya stunting. Gizi merupakan indikator kesehatan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah status gizi balita. Status gizi balita diukur melalui umur, berat badan, dan tinggi badan. Berdasarkan indikator tersebut gizi menyebabkan adanya stunting, underweight, dan wasting. Kabupaten Lamongan melalui data yang diperoleh sementara terdapat anak penderita stunting masih 27,5%, underweight 7,98%, dan wasting 7,11% (Dinas Kesehatan, 2022). Masalah keempat mengenai pemberian asi eksklusif yaitu pemberian asi yang dilakukan oleh ibu kepada anak dari usia bayi baru lahir hingga usia 6 bulan tanpa digantikan makanan atau minuman lainnya. Asi eksklusif dapat mempengaruhi adanya perkembangan bayi. Namun pemberian asi eksklusif di Kabupaten Lamongan sendiri masih kurang optimal dimana dari tahun 2021 menuju tahun 2022 capaian pemberian asi eksklusif menurun dari 78% tahun 2021 menjadi 75% tahun 2022 data tersebut tercantum dalam profil kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinas Kesehatan, 2022).

Pembentukan tim sebagai unsur penting penurunan stunting juga telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting maka dibentuklah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/133/KEP/413.013/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lamongan. Tim tersebut dibentuk bertujuan untuk menyelenggarakan perkembangan berkelanjutan percepatan penurunan stunting dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergis, dan sinkronisasi antara perangkat daerah, desa dan pemangku kepentingan guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif (Ro'is, 2022). Berdasarkan tim yang telah dibentuk tersebut dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan berbagai pihak non pemerintahan dalam penurunan stunting. Kolaborasi dengan non pemerintahan terdiri dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Koalisi Kependudukan Indonesia, Nadhatul Ulama, Aisyiyah Muhammadiyah, Penyuluh Keluarga Berencana, Universitas Islam Lamongan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional (PPN), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKL) serta berkolaborasi dengan Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) dan Kepala Kepolisian Lamongan (Nursiyanto, 2022). Program 1-10-100 yang terdiri dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lamongan. Ketua TP PKK merupakan ketua dari program 1-10-100 yang berperan sebagai penanggung jawab seluruh jalannya program. Selanjutnya terdapat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dimana salah satu anggota (IDI) ada dr. Taufik Hidayat yang berperan sebagai ahli kesehatan yang memberikan penyuluhan dengan memaparkan terkait penanganan stunting. Masyarakat ikut berperan dan menjadi obyek ataupun sebagai sebagian dari orang tua asuh penderita stunting yang untuk menerapkan aturan yang diberikan bagi penderita stunting/obyek dan melaksanakan arahan terkait program seperti orang tua asuh yang melaksanakan peran untuk monitoring anak penderita stunting yang diasuh (Ro'is, 2023).

Program ini memiliki target anak asuh yang telah memiliki orang tua asuh sebesar 2000 anak dari 2900 anak, Namun sejak program ini diluncurkan hingga sekarang anak stunting yang memiliki orang tua asuh baru 869 anak dari pembagian 100 orang tua asuh. Sehingga masih terdapat tantangan sebesar 1131 anak stunting yang belum tertangani agar mencapai target yang ditentukan. Target yang telah ditentukan tersebut ditujukan masyarakat untuk dicapai pada tahun 2023, sedangkan sekarang sudah menempati bulan November tahun 2023 dan belum terdapat update peningkatan anak asuh yang telah memiliki orang tua asuh (Diskominfo, 2023). Orang tua asuh ini kebanyakan masih dari pihak pemerintahan belum banyak melibatkan non pemerintahan/swasta dan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dalam lampiran orang tua asuh pada SK Tim Orang tua Asuh yang masih belum terdapat

berbagai pihak diluar pemerintahan. Oleh karena itu kolaborasi dari pemerintah, non pemerintahan/swasta dan masyarakat belum terlaksana secara baik. Komitmen belum terjalin secara optimal dan tidak sesuai SK TPPS Kabupaten Lamongan (Ro'is, 2023). Program 1-10-100 kurang tepat sasaran dan kesadaran masyarakat luas terkait 1-10-100 ini juga belum ada, serta sosialisasi yang dilakukan belum maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini sehingga kolaborasi dalam program ini belum maksimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks tingkat *collaborative governance*. Penelitian Yuni Kurniasih, Sri Suwitri, dan Septiana Wulan Hapsari pada tahun 2023 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Temanggung,” menemukan bahwa terdapat satu aksi yang belum dapat direalisasikan yaitu penyusunan peraturan Bupati atau walikota, selain itu terdapat hambatan dalam internal yaitu ketidakhadiran anggota dalam forum diskusi karena jadwal yang bersamaan serta perubahan anggota dikarenakan mutasi pegawai (Yuni Kurniasih, 2023),

Penelitian Ipan, Hany Purnamasari, Evi Priyanti pada tahun 2021 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting,” menemukan bahwa proses kolaborasi akan dapat memotivasi para stakeholder yang terlibat untuk berbuat dan berinovasi untuk pencapaian tujuan penurunan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel (Ipan, Hany et al., 2021).

Penelitian Nindya Tiara Fatikha, dan Ane Permatasari pada tahun 2023 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting.” Hasil yang didapatkan kurang optimalnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah (Nindya Tiara, 2023).

Penelitian Qori Hidayasa, Fitri Kurnianingsih, dan Agus Hendrayady pada tahun 2023 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan.” Hasil penelitian yang didapat membuktikan bahwa Perlu ditekankan upaya dalam membangun kepercayaan bersama masyarakat serta pemahaman dari para pemangku kepentingan dalam memahami tupoksi tugas masing-masing (Qori Hidayasa, 2023).

Penelitian Evalia Nuranita Putri dan Herbasuki Nurcahyanto pada tahun 2019 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.” Hasil yang didapatkan berupa terdapat hambatan pada sumber daya manusia, komitmen kepala desa rendah, dominasi sektor kesehatan, dan masalah pengunggahan data (Evalia, 2019).

Penelitian Sukanti, dan Nur Faidanti pada tahun 2021 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman.” Hasil yang ditemukan menunjukkan belum tersedia forum komunikasi secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran swasta (Sukanti., 2021).

Penelitian Faldianus Alvinolatu pada tahun 2022 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Hasil yang ditemukan menunjukkan terjadi kolaborasi cangkang dimana ada masalah di manajemen ketatalaksana dan kelembagaan (Faldianus, 2022).

Penelitian Chamid Sutikno dan Alban Naufal pada tahun 2023 yang berjudul “*Proses Collaborative Governance* Penanggulanagn Stunting di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.” Hasil yang ditemukan menunjukkan *Collaborative governance* telah mampu menurunkan angka stunting. (Chamid Sutikno., 2023).

Penelitian Winda Anggraeni pada tahun 2022 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Program

Penanganan Stunting.” Hasil yang ditemukan menunjukkan pelaksanaan program dalam *collaborative governance* telah berjalan dengan konvergensi. (Winda., 2022).

Penelitian Ahmad Saufi pada tahun 2021 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Covid-19..” Hasil yang ditemukan menunjukkan lemahnya dukungan dan pemerintah masih bersifat sentralistik dan dominan pada penguasaan sumber daya, menjadikan kolaborasi tidak berjalan dengan baik (Ahmad Saufi., 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni proses *collaborative governance* terhadap program Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dan menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah dengan konsep *collaborative governance*. Metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif dengan analisa data dengan menggunakan aplikasi Nvivo berbeda dengan penelitian Kurniasih et al., 2023, Purnamasari et al., 2021, Fatikha & Permatasari, 2023, Hidayasa et al., 2023, Putri & Nurcahyanto, 2019, Sukanti & Faidati, 2021, Latu, 2022, Sutikno & Naufal, 2023, Anggraeni, 2022, Saufi, 2021. Penelitian sebelumnya tersebut disusun berdasarkan objek penelitian, tujuan penelitian, teori dan metode yang digunakan, persamaan dan perbedaan penelitian serta hasil penelitian. Tujuan penyusunan penelitian sebelumnya adalah untuk memudahkan penulis dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya. Terdapat sepuluh penelitian tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada pada objek, teori dan metode yang digunakan yaitu terkait objek stunting dengan teori *Collaborative Governance* melalui metode kualitatif deskriptif. Namun terdapat perbedaan pada lokus dan fokus penelitian, serta teori yang digunakan terdapat 3 penelitian yang menggunakan teori dari Emercon, Nabatchi, dan Balogh yaitu penelitian oleh Kurniasih et al., 2023, Fatikha & Permatasari, 2023, Saufi, 2021, untuk 7 penelitian lainnya menggunakan teori oleh Ansell and Gash, Selain itu, perbedaan lainnya yaitu perbedaan terlihat jelas bahwa fokus dari setiap penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ini berbeda. Dalam penelitian ini nantinya akan berfokus pada bagaimana *collaborative governance* dalam penurunan stunting tersebut berjalan. Mulai dari cara kerja hingga strategi apa yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana *collaborative governance* dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur melalui program 1-10-100.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data menggunakan aplikasi Nvivo. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan pengamatan adalah menggunakan metode deskriptif. Menurut Adiputra (2021) penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang sesuai dengan kenyataannya, seperti fenomena buatan manusia atau alam, biasanya digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil subjek namun tidak memberikan implikasi yang luas. Penelitian deskriptif muncul akibat adanya berbagai pertanyaan sesuai dengan pentingnya masalah yang akan diambil. Penulis mengumpulkan data melalui dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat yang berkaitan dengan stunting seperti penderita stunting, orang

tua asuh, dan sebagainya, serta kepada kepala dinas kesehatan, bidang kesehatan masyarakat, puskesmas yang ditunjuk sebagai ahli gizi.

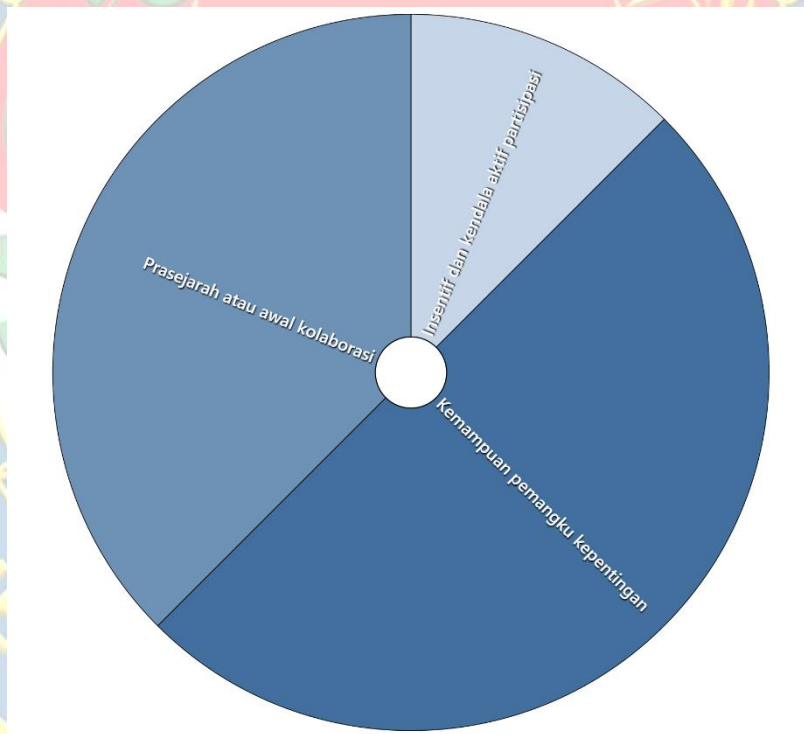
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *collaborative governance* pada pelaksanaan program 1-10-100 dalam penanganan stunting di Kabupaten Lamongan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan suatu permasalahan sebelum adanya perbaikan melalui kebijakan yang dilakukan dengan relasi antara stakeholder untuk menghasilkan suatu bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang sedang dijalankan. Adapun indikator dalam dimensi kondisi awal yaitu prasejarah atau awal proses kolaborasi, kemampuan pemangku kepentingan, serta insentif dan kendala aktif partisipasi (Ansell dan Gash, 2008).

Gambar 3. Hierarchy Chart Dimensi Kondisi Awal



Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 12, 2024

Pada **Gambar 3** ini menampilkan *Hierarchy Chart* dimensi kondisi awal yang terdiri dari beberapa indikator yang memiliki proporsi yang berbeda beda menurut dengan ketebalan warna. Semakin tebal warna pada chart tersebut maka indikator tersebut sering dibahas atau dibicarakan oleh informan saat pelaksanaan penelitian).

3.2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan suatu unsur yang penting karena fasilitator memiliki peran dalam memastikan integritas membangun suatu sistem pemerintahan. Suatu pemerintahan akan mengalami kesuksesan jika dapat menggunakan kolaborasi antara pemangku kepentingan yang tidak tunggal dan bersifat formal dan informal, dimana terdiri dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan, karena tidak dapat jika hanya mengandalkan satu pemimpin saja. Indikator dalam dimensi ini adalah manajemen terhadap proses kolaborasi, dan memastikan kolaborasi diberdayakan dalam membuat keputusan (Ansell & Gash, 2008).

Gambar 4 *Word Frequency Query* Kepemimpinan Fasilitatif



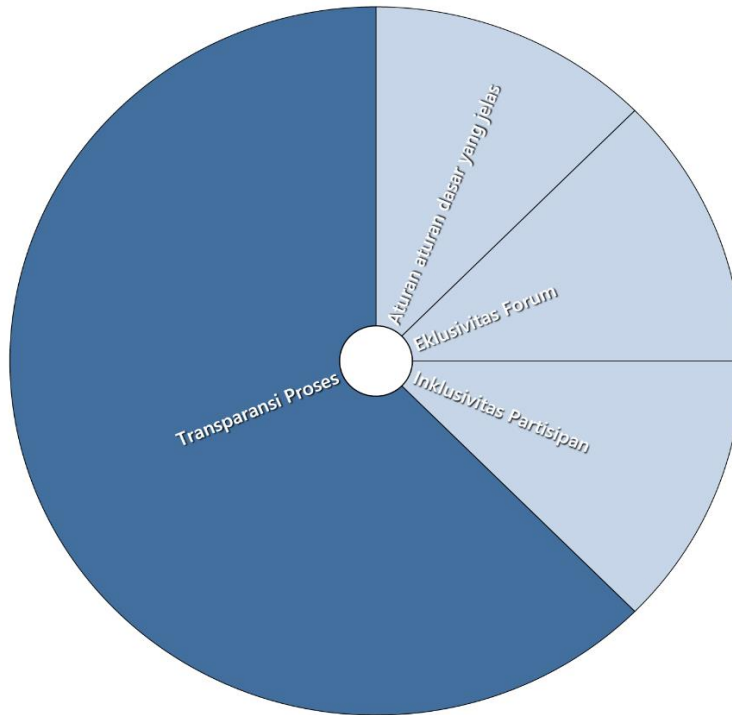
Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 12, 2024

Pada **Gambar 4** tersebut peran pemangku kepentingan sering membahas mengenai program yaitu program 1-10-100. Peran pemangku kepentingan memang sangatlah penting sebagai awal mula keberhasilan suatu program. Sehingga dalam pelaksanaan program 1-10-100 ini untuk membahas terkait program dilaksanakan pertemuan bulanan oleh TP PKK.

3.3. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan ini merupakan aspek penting yang perlu menjadi perhatian, dalam hal ini terdapat pada kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia. Indikatornya adalah inklusivitas partisipatif, eksklusivitas forum, aturan dasar yang jelas dan proses yang transparan (Ansell dan Gash, 2008).

Gambar 5. Hierarchy Chart Dimensi Desain Kelembagaan



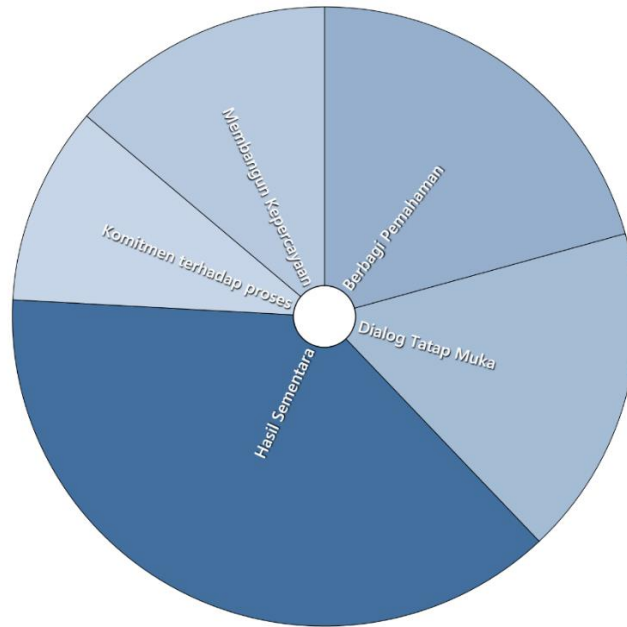
Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 12, 2024.

Dalam hasil pada **Gambar 5** menjelaskan bahwa pada dimensi desain kelembagaan memiliki 4 indikator yaitu inklusivitas partisipatif, eksklusivitas forum, aturan-aturan yang jelas, dan transparansi proses.

3.4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam melakukan suatu kegiatan keputusan kebijakan. Indikator membentuk kolaboratif tersebut adalah dialog tatap muka (*face to face*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dimana dalam hal kolaborasi ini dibentuk tim yang mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai masalah kolaborasi tertentu yang mengatur tugas dan peran masing-masing pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

Gambar 6. Hierachy Chart Dimensi Proses Kolaborasi



Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 12, 2024

Dalam hasil pada **Gambar 6** menjelaskan adanya indikator yang sering dibahas dengan warna paling gelap dan tidak sering dibahas warna terang. Dimensi proses kolaborasi ini terdiri dari beberapa indikator yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi Nvivo 12. Nvivo adalah program yang mendukung penelitian kualitatif yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur, menganalisis, dan mengemukakan wawasan dalam data tidak terstruktur seperti wawancara, artikel, media sosial, konten web, dan sebagainya. Kemampuan Nvivo adalah mengatur semua data penelitian dalam sebuah tempat, mengimpor atau membuat tempat untuk sumber materi, memberi kode pada data sumber sesuai topik, memberi kode cepat, mencatat ide dan pengamatan, membuat model konsep berdasarkan data, dan membuat tampilan laporan (Wahid, 2023). Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis melalui Nvivo 12 pada penjelasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai *Collaborative Governance* Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur berdasarkan dimensi-dimensi. Dimensi kondisi awal, proporsi indikator kemampuan pemangku kepentingan merupakan indikator yang sering dibahas dilanjut dengan prasejarah atau awal kolaborasi. Temuan pada dimensi ini adanya kekurangan pada indikator insentif dan kendala aktif partisipasi yang memiliki kekurangan yaitu tidak adanya hak dan tanggung jawab yang sama dalam berkolaborasi. Dimensi kepemimpinan fasilitatif, dimensi ini hanya satu indikator yaitu peran pemangku kepentingan. Pada hasil *word frequency query* kata “program” adalah kata yang sering muncul membahas terkait program 1-10-100 yaitu salah satu upaya penurunan stunting di Kabupaten Lamongan. Dimensi desain kelembagaan, proporsi yang didapat melalui *hierachy chart* adalah transparansi proses lebih dominan dibanding indikator lainnya. Temuan melalui indikator aturan-aturan

yang jelas pada program ini aturan yang digunakan hanya SK TPPS Kabupaten Lamongan dan SK Orang Tua Asuh, SOP untuk melaksanakan program tidak ada. Dimensi proses kolaborasi, proporsi yang didapat melalui *hierarchy chart* adalah indikator hasil sementara lebih sering dibahas oleh informan. Hasil sementara yang didapatkan adalah terdapat satu pemangku kepentingan yang terlalu dominan yaitu TP PKK serta aturan-aturan kurang lengkap untuk program 1-10-100 karena hanya menggunakan SK TPPS di Kabupaten Lamongan nomor 188/133/KEP/413.013/2022 dan SK Orang Tua Asuh Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lamongan nomor 188/324/KEP/413.013/2023 serta tidak memiliki SOP program 1-10-100.

IV. KESIMPULAN

Pada dimensi kondisi awal, proporsi pada indikator kemampuan pemangku kepentingan paling sering dibahas dibandingkan dengan indikator lainnya, sehingga indikator ini yang mendominasi dibandingkan dengan indikator prasejarah. Dari dimensi ini ditemukan adanya kekurangan pada keaktif partisipasi sehingga tidak adanya hak dan tanggung jawab yang sama oleh stakeholder dalam berkolaborasi.

Dimensi kepemimpinan fasilitatif, hasil word frequency query kata “program” adalah kata yang sering muncul. Dimana melalui pertemuan rutin para pemangku kepentingan telah berupaya untuk melaksanakan program 1-10-100.

Dimensi desain kelembagaan, proporsi indikator transparansi proses lebih dominan dibanding indikator lainnya. Temuan pada dimensi ini yaitu, aturan yang digunakan hanya SK TPPS Kabupaten Lamongan dan SK Orang Tua Asuh, sedangkan SOP untuk melaksanakan program tidak ada.

Dimensi proses kolaborasi, proporsi indikator hasil sementara lebih sering dibahas oleh informan dibandingkan dengan indikator lainnya. Dimana terdapat satu pemangku kepentingan mendominasi yaitu TP PKK serta aturan-aturan kurang lengkap untuk program 1-10-100 karena tidak memiliki SOP pada pelaksanaannya, dalam hal ini disarankan kepada pencetus program 1-10-100 untuk membuat SOP program 1-10-100 agar pelaksanaan program 1-10-100 terlaksana secara jelas dan dapat diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Dominan dilaksanakan oleh TP PKK, dalam hal ini disarankan untuk TP PKK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan program 1-10-100 dengan tanggung jawab dan tupoksi yang sama agar tidak terlalu dominan kepada salah satu pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan program 1-10-100 juga akan lebih efektif

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Ansell dan Gash.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap level pemerintahan yang lebih tinggi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan meluas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan Organisasi TPPKK Kabupaten Lamongan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell dan Gash. 2008. *Collaborative Governance* in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory. Volume; 543 571.
- Faidati, Nur dan Sukanti. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Faldianus, Alvino Latu. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- alfaFatikha, dkk. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Stunting. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hidayasa, dkk. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ipan, dkk. (2021). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting. Karawang: Universitas Singaperbangsa.
- Nuranita Putri, Evalia dan Nurcahyanto, Herbasuki. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Saufi, Ahmad. (2021). *Dinamika Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. Lembaga Pengembangan Masyarakat Equator.
- Siswati, T. (2018). *Stunting*. Husada Mandiri Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Siswanto, dkk. (2013). *Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemetrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Sutikno, Chamid dan Naufal, Alban. (2023) *Proses Collaborative Governance* Penanggulangan Stunting di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Purwokerto.
- UNICEF. (2020). *Situasi Anak di Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Kemenkes RI. (2022). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/133/KEP/413.013/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting.
- Kurniasih, dkk. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Percepatan Stunting di Kabupaten Temanggung. Magelang: Universitas Tidar.
- Wahid, Kususiyah, Sirait dan Umbar. (2023). *Analisis Data Kualitatif Menggunakan Nvivo*. Publica Indonesia Utama